

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses penyidikan tindak pidana narkotika dengan memperhatikan penerapan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) di Satresnarkoba Polresta Jambi serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Penyidikan tindak pidana narkotika sering menghadapi tantangan berupa stigma negatif terhadap tersangka, kurangnya kooperatif dari tersangka, serta keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, yang dapat menghambat pelaksanaan asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari dokumen hukum, literatur, dan peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan di Satresnarkoba Polresta Jambi telah dilakukan dengan langkah-langkah preventif seperti validasi bukti sebelum penyidikan dimulai dan pelibatan pihak ketiga dalam proses penangkapan untuk menjamin transparansi. Namun, kendala seperti resistensi tersangka, stigma negatif, dan keterbatasan sumber daya masih menjadi hambatan yang memengaruhi efektivitas penerapan asas praduga tak bersalah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun penerapan asas praduga tak bersalah telah diupayakan secara optimal, diperlukan peningkatan kapasitas penyidik dan penyediaan fasilitas pendukung untuk memastikan proses penyidikan dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kata Kunci: *Asas Praduga Tak Bersalah, Penyidikan, Tindak Pidana Narkotika, Satresnarkoba Polresta Jambi, Penegakan Hukum.*

ABSTRACT

This study aims to examine the investigation process of narcotics-related crimes with a focus on the application of the presumption of innocence principle at the Satresnarkoba Polresta Jambi and to identify the challenges encountered in its implementation. The investigation of narcotics-related crimes often faces obstacles such as negative stigma towards suspects, lack of cooperation from suspects, and limited human resources and facilities, which can hinder the application of the presumption of innocence as stipulated in Indonesian regulations. This study employs an empirical juridical approach with a descriptive qualitative method. Primary data were obtained through interviews with investigators, while secondary data were gathered from legal documents, literature, and relevant regulations. The findings indicate that the investigation process at Satresnarkoba Polresta Jambi has been carried out with preventive measures, such as evidence validation prior to the commencement of the investigation and the involvement of third parties during arrests to ensure transparency. However, challenges such as suspect resistance, negative stigma, and resource limitations remain significant obstacles affecting the effective implementation of the presumption of innocence principle. Enhancing investigator capacity and improving support facilities are deemed essential to ensure that the investigation process aligns with the principles of justice and respect for human rights.

Keywords: *Presumption of Innocence, Investigation, Narcotics Crime, Satresnarkoba Polresta Jambi, Law Enforcement.*